

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA  
DI DESA DOLODUO SATU KECAMATAN DUMOGA BARAT  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**Bakir Bonde**

[yymbmanado@gmail.com](mailto:yymbmanado@gmail.com)

Kepada Desa Doloduo Satu Kecamatan Dumoga Barat

**Agus Wahono**

Universitas Wijaya Putra Surabaya

**ABSTRACT**

*This research describes the implementation process of Village Fund Allocation Policy (ADD) and Village Fund (DD) as seen from the indicators of organizing, interpretation and application as well as the factors that support and influence the implementation of ADD and DD Policy in Mopuya Village, Dumoga District North Bolaang Mongondow District. This study used descriptive qualitative method. Qualitative methods interpret the meaning of an event of interaction behavior of people in certain situations from their own perspective. The results show that the implementation process of ADD and DD Policy in Mopuya Village, North Dumoga District has not fully lead to the socio-economic development of rural people. Factors influencing successful implementation of ADD and DD programs in the empowerment of rural communities such as Human Resources (HR), socialization and channeling of funds, and coordination is still not in accordance with expectations that led to the implementation of programs ADD and DD in Mopuya Village District Dumoga Utara District Bolaang Mongondow does not run optimally.*

*Keywords: policy implementation, village funds, village communities*

**ABSTRAK**

Penelitian ini mendeskripsikan proses implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang dilihat dari indikator pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi serta faktor-faktor yang mendukung dan memengaruhi implementasi Kebijakan ADD dan DD di Desa Mopuya Kecamatan Dumoga Utara Kabupaten Bolaang Mongondow. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode kualitatif menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif sendiri. Hasil penelitian menunjukkan proses implementasi Kebijakan ADD dan DD di Desa Mopuya Kecamatan Dumoga Utara belum sepenuhnya mengarah pada pengembangan sosial ekonomi masyarakat desa. Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan program ADD dan DD dalam pemberdayaan masyarakat desa diantaranya Sumber Daya Manusia (SDM), sosialisasi dan penyaluran dana, serta koordinasi masih belum sesuai dengan harapan sehingga menyebabkan proses implementasi program ADD dan DD di Desa Mopuya Kecamatan Dumoga Utara Kabupaten Bolaang Mongondow tidak berjalan dengan optimal.

Kata kunci: implementasi kebijakan, dana desa, masyarakat desa

## PENDAHULUAN

Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam UU No 6/2014 tentang Desa dan PP No 43/2014. Berdasarkan ketentuan ini desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Pemahaman mengenai desa tersebut menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional secara luas. Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan keberhasilan dari segala urusan dan program dari Pemerintah. Apalagi penduduk Indonesia menurut sensus tahun 2000 sekitar 60 % atau sebagian besar penduduk Indonesia saat ini masih bertempat tinggal di kawasan pedesaan. Menjadi sangat logis apabila pembangunan desa menjadi prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional.

Desa berdasarkan ketentuan PP No 72/2005, diberikan kewenangan yang mencakup 1) urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa; 2) urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa; 3) tugas pebantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan 4) urusan pemerintahan lainnya yang oleh perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Sebagai konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi desa adalah tersedianya dana yang cukup. Sadu Wasistiono (2006:107) menyatakan bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan faktor esensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah. Sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa 'autonomy' identik dengan 'auto money' maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya.

Sumber pendapatan desa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) UU 06/2016 terdiri dari: a) pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa, b) alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, c) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, d) alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota, e) bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, f) hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan g) lain-lain pendapatan desa yang sah.

Dalam kaitannya dengan pemberian ADD di Kabupaten Bolaang Mongondow, pemerintah kabupaten telah memberikan petunjuk teknis melalui Peraturan Bupati No 08/2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2016 pada Bab V pasal 14 dijelaskan, pengaturan prioritas penggunaan ADD bertujuan untuk: a) menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa yang dibiayai oleh ADD, b) sebagai acuan bagi pemerintah kabupaten dalam menyusun

pedoman teknis penggunaan dana desa, dan c) sebagai acuan bagi pemerintah dalam pemantuan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan ADD.

Bantuan Langsung ADD adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada pemerintah desa digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembangunan, dan bidang pemberdayaan masyarakat yang pemanfaatan dan administrasi pengelolanya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh kepala desa. Maksud pemberian Bantuan Langsung ADD adalah sebagai bantuan stimulan atau dana peransang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong-royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow memberikan kontribusi sebesar Rp 8.319.924.445 atau 53,22% dari jumlah Sedangkan Pendapatan Asli Desa (PAD) hanya memberikan kontribusi 25,42%. Bahkan dalam kenyataannya sumber-sumber penerimaan dari PAD tidak semuanya memberikan kontribusi yang nyata bagi keuangan desa. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang dibiaya oleh ADD dan DD masih sangat rendah.

Berdasar uraian di atas maka penelitian ini memiliki tujuan, yaitu : untuk memberikan gambaran implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa di Desa Doloduo Satu Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa di Desa Doloduo Satu Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow.

Penelitian berkaitan dengan implementasi kebijakan ADD sudah

dilakukan antara lain oleh Hargono ( 2011 ) di Kabupten Karang Asem Bali menemukan besarnya Alokasi Dana Desa yang diberikan pada setiap desa tidak menggunakan formula yang ditentukan dengan pembobotan tujuh variabel penting desa. Tetapi menggunakan total jumlah desa dikabupaten untuk penentuan ADDM (ADD Merata) dan pembagian total jumlah banjar dinas untuk penentuan ADDP ( ADD Proporsional ). Dengan demikian, cara tersebut dinilai tidak adil bagi desa, sehingga menimbulkan ketidakefektifan penyaluran ADD.

Penelitian Thomas (2011) mengenai Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam upaya meningkatkan pembangunan di Desa Sebawang Kecamatan Sesyap Kabupaten Tanah Tidung. Hasil kajiannya menunjukkan 30 % dari dana ADD bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan sisannya kurang optimal. Rendahnya sumber daya manusia aparat desa dan kurangnya koordinasi tentang pengelolaan ADD disinyalir menjadi hambatan dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Penelian dari Aldi (2012) menyimpulkan pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu belum efektif, beberapa kendala yang ditemui seperti kurangnya partisipasi masyarkat, belum berlakunya pembagina Alokasi Dana desa sesuai ketentuan perturan pemerintah. Selain itu masih ada 'lobi-lobi' yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada pemerintah daerah hal ini terkait dengan relatif rendahnya sumber daya manusia di desa.

## **TINJAUAN TEORETIS**

### **Implementasi Kebijakan**

Menurut Hogwood dan Gunn (Wahab,1997 : 71-81 ), untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna maka diperlukan beberapa pesyaratan antara lain kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana. Selain itu juga diperlukan tersedianya waktu dan sumber daya,

keterpaduan sumber daya yang diperlukan, implementasi didasarkan pada hubungan kausalitas yang handal, hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubung, hubungan ketergantungan harus dapat diminimalkan, kesamaan persepsi dan kesepakatan terhadap tujuan, tugas-tugas dirinci dan diurutkan secara sistematis, komunikasi dan koordinasi yang baik, pihak-pihak yang berwenang dapat menuntut kepatuhan pihak lain.

Menurut Grindle (Wibawa, 1994) implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Isi kebijakan berkaitan dengan kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan, jenis manfaat yang akan dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, jenis manfaat yang akan dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, siapa pelaksana program, dan sumber daya yang dikerahkan. Sementara konteks implementasi berkaitan dengan kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlihat, karakteristik lembaga, penguasaan dan kepatuhan serta daya tanggap pelaksana. Sedangkan George C Edward III dalam Subarsono (2015: 90) memberikan pandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yakni: komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap), struktur birokrasi dan keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

G. Sahbir Cheema dan Dennis A. Rondnelli (AG.Subarsono, 2005:101) menyatakan bahwa ada empat variabel yang dapat memengaruhi kinerja dan dampak suatu program, yaitu kondisi lingkungan, hubungan antarorganisasi, sumber daya organisasi untuk implementasi program, karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

### **Faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan**

#### **a. Komunikasi**

Menurut Wiratmo dkk (1996:220), komunikasi adalah proses berbagai informasi dengan individu-individu lainnya. Informasi merupakan suatu pikiran atau gagasan yang hendak diberikan kepada individu-individu lainnya. Komunikasi merupakan keterampilan manajemen yang sering digunakan dan sering disebut sebagai satu kemampuan yang sangat bertanggungjawab bagi keberhasilan seseorang. Komunikasi sangat penting sehingga orang-orang sepenuhnya tahu bagaimana mereka berkomunikasi.

Kenneth dan Gary (dalam Umar, 2001:25) mengemukakan bahwa komunikasi dapat diidentifikasi sebagai penyampaian informasi antara dua orang atau lebih yang juga meliputi pertukaran informasi antara manusia dan mesin. Komunikasi dalam organisasi dapat dilihat dari sisi komunikasi antarpribadi dan komunikasi organisasi.

Sedangkan Cangara (2001: 18) menyatakan komunikasi adalah 'suatu transaksi, proses simbolik yang menghendaki orang-orang mengatur lingkungannya dengan (1) membangun hubungan antara sesama manusia, (2) melalui pertukaran informasi, (3) untuk menguatkan sikap dan tingkah laku. Menurut Widjaja (2000:88), komunikasi adalah 'proses penyampaian gagasan, harapan dan pesan yang disampaikan melalui lambang tertentu yang mengandung arti dilakukan oleh penyampai pesan kepada penerima pesan. Daslam Proses komunikasi kebersamaan tersebut diusahakan melalui tukar menukar pendapat, penyampaian informasi, serta perubahan sikap dan perilaku.'

Tujuan komunikasi keorganisasian antara lain untuk memberikan informasi baik kepada pihak luar maupun pihak dalam, memanfaatkan umpan balik dalam rangka proses pengendalian manajemen, mendapatkan pengaruh, alat untuk memecahkan persoalan, untuk pengambilan

keputusan, mempermudah perubahan-perubahan yang akan dilakukan, mempermudah pembentukan kelompok-kelompok kerja serta dapat dijadikan untuk menjaga pintu keluar masuk dengan pihak-pihak luar organisasi (Umar, 2001:27).

Hal senada juga dikemukakan George C. Edward (Winarno, 2002:126) yang menyatakan ada tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan (*clarity*). Faktor utama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari suatu keputusan setelah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Ada hambatan-hambatan dalam mentransmisikan perintah-perintah implementasi. Pertama, pertentangan pendapat atarapara pelaksana dengan perintah yang dikelurkan oleh pengambil kebijakan. Kedua, informasi melewati berlapis-lapis hirarki birokrasi.

Faktor kedua yang memengaruhi komunikasi menurut Edward adalah kejelasan. Jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksana tidak hanya diterima para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Ketidakjelasan pesan komunikasi disampaikan berkenaan dengan implementasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal. Faktor ketiga yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah konsistensi. Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi bila perintah bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan melaksanakan tugasnya dengan baik.

Berkaitan dengan penelitian implementasi kebijakan ADD ini maka hal yang digunakan untuk mengukur komunikasi adalah intensitas sosialisasi kebijakan ADD, kejelasan komunikasi kebijakan ADD dari para pelaksana, dan konsistensi perintah-perintah kebijakan ADD.

#### **b. Sumber daya**

Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten. Tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi ini pun cenderung tidak efektif. Dengan demikian sumber daya-sumber dapat merupakan faktor penting dalam melaksanakan kebijakan publik (Winarno, 2002:132).

Manusia di dalam organisasi mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena manusia adalah yang bisa mengetahui *input-input* apa yang perlu diambil dari lingkungan, dan bagaimana caranya untuk mendapatkan atau menangkap *input*, teknologi dan cara apa yang dianggap tepat untuk mengolah atau mentransformasikan *input-input* menjadi *output-output* yang memenuhi keinginan lingkungan. Dengan demikian, terdapat variabel utama yang memengaruhi organisasi, yaitu manusia dan lingkungan, yang saling berinteraksi menurut pola tertentu, dan masing-masing memiliki karakteristik atau nilai-nilai tertentu. Winarno (2002:138) juga menyebutkan bahwa sumber-sumber yang akan mendukung kebijakan yang efektif terdiri dari jumlah staf yang mempunyai keterampilan yang memadai serta jumlah yang cukup, kewenangan, informasi, dan fasilitas. Sumber-sumber yang akan memengaruhi implementasi kebijakan ADD adalah 1) kemampuan sumber daya manusia pelaksana ADD dan 2) penyediaan fasilitas-fasilitas yang mendukung kebijakan ADD.

#### **c. Sikap**

Sikap merupakan seperangkat pendapat, minat, atau tujuan, yang mengikuti harapan akan suatu jenis pengalaman tertentu, dan kesediaan dengan suatu reaksi yang timbul atas suatu ransangan dari situasi atau seseorang. Sedangkan Gibson (1993:57) mendefinisikan 'sikap (*attitude*) adalah kesiapsiagaan mental, yang dipelajari dan diorganisasi melalui pengalaman dan mempunyai pengaruh tertentu atas cara tanggap seseorang terhadap orang lain, objek dan situasi yang berhubungan dengannya.'

Menurut Wijaya (2000:111), ada tiga tahapan yang harus dilalui seseorang agar dapat meningkatkan kesadarannya dalam memenuhi kewajiban yaitu aspek kognitif, yang berhubungan dengan gejala pikiran; aspek efektif, yang berkaitan dengan proses yang menyangkut perasaan tertentu dan aspek psikomotor, yang berkaitan dengan kecenderungan untuk bertindak terhadap suatu objek. Sikap merupakan kumpulan dari berpikir, keyakinan dan pengetahuan. Berkaitan penelitian ini maka hal yang digunakan mengukur sikap adalah persepsi pelaksana terhadap kebijakan ADD, respons pelaksana kebijakan ADD dan tindakan pelaksana kebijakan ADD.

#### **d. Struktur Birokrasi**

Pengertian birokrasi menunjuk pada suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mengarahkan tenaga dengan teratur dan terus menerus, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Birokrasi adalah organisasi yang bersifat hirarkis, yang ditetapkan secara rasional untuk mengoordinasikan pekerjaan orang-orang untuk kepentingan pelaksanaan tugas-tugas administrasi (Lewis A. Coser dan Bernard Resenberg dalam Soekarno, 1982:293). Menurut Max Weber (dalam Soekarno, 1982:293-294) ciri-ciri birokrasi dan cara terlaksananya paling sedikit mencakup lima unsur, yaitu : organisasi, pengerahan tenaga, sifatnya yang teratur,

bersifat terus-menerus dan mempunyai tujuan.

Struktur organisasi yang baik harus memenuhi syarat sehat dan efisien. Struktur organisasi sehat berarti tiap-tiap satuan organisasi yang ada dapat menjalankan peranannya dengan tetib. Struktur organisasi efisien berarti dalam menjalankan perannya tersebut masing-masing satuan organisasi dapat mencapai perbandingan antara usaha dan hasil kerja. Agar dapat diperoleh struktur organisasi yang sehat dan efisien, pada waktu membentuk harus memerhatikan berbagai asas organisasi (Sutarto, 1995:43).

Menurut Steers (1985:70) sekurang-kurangnya ada enam faktor struktur yang dapat dikenali yang memengaruhi inplementasi kebijakan organisasi. Keenam faktor ini adalah (1) tingkat desentralisasi, (2) spesialisasi fungsi, (3) formalisasi, (4) rentang kendali, (5) ukuran organisasi, (6) ukuran unit kerja. Sedangkan Robbins (2006: 585) menyebutkan ada enam unsur utama untuk merancang struktur organisasi yaitu spesialisasi pekerjaan, departementalisasi, rantai komando, rentang kendali, sentralisasi dan desentralisasi, serta formalisasi. Desentralisasi adalah batas perluasan berbagai jenis kekuasaan dan wewenang dari atas kebawah dalam hierarki organisasi. Dengan demikian pengertian desentralisasi berhubungan erat dengan konsep partisipasi dalam pengambilan keputusan. Makin luas desentralisasi makin luas ruang lingkup bawahan dapat turut serta dalam memikul tanggungjawab atas keputusan-keputusan mengenai pekerjaan mereka dan kegiatan mendatang dari organisasinya (Steers, 1985:71)

Spesialisasi adalah pembagian fungsi-fungsi organisasi menjadi kegiatan-kegiatan yang sangat khusus. Spesialisasi dapat diukur dengan berbagai cara, mencakup jumlah divisi dalam sebuah organisasi dan jumlah bagian dalam setiap divisi, jumlah posisi yang berlainan dan jumlah sub unit yang

berbeda dalam sebuah organisasi, dan jumlah pekerjaan dan jabatan yang terdapat dalam sebuah organisasi. Spesialisasi memungkinkan setiap pekerja mencapai keahlian dibidang tertentu sehingga dapat memberikan sumbangan secara maksimal pada kegiatan kearah tujuan (Steers, 1985:74).

#### e. Lingkungan

Robbins (2003:608) menyatakan lingkungan tidak pernah kekurangan definisi. Benang merah yang menghubungkannya adalah pertimbangan atas faktor di luar organisasi itu sendiri. Definisi yang paling populer, lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar batas organisasi. Lingkungan organisasi itu sendiri terdiri dari lembaga-lembaga atau kekuatan-kekuatan yang berada di luar organisasi dan berpotensi memengaruhi kinerja organisasi itu. Lazimnya lingkungan ini mencakup pemasok, pelanggan, pesaing, badan otoritas pemerintah, kelompok publik penekan dan sebagainya.

Selanjutnya juga dikatakan bahwa terdapat tiga dimensi utama lingkungan organisasi, yaitu kapasitas, volatilitas, dan kompleksitas. Kapasitas lingkungan mengacu sampai tingkat mana lingkungan itu mendukung adanya pertumbuhan. Lingkungan yang kaya dan bertumbuh akan menimbulkan sumber daya yang berlebihan, sehingga dapat menyangga organisasi pada saat kelangkaan relatif. Kapasitas yang berlebihan dapat memberi kesempatan bagi sebuah organisasi membuat kesalahan, sedangkan kapasitas yang langka tidak menoleransi adanya kesalahan. Tingkat ketidakstabilan lingkungan dimasukkan dalam dimensi *volatility*, jika terdapat tingkat perubahan yang tidak dapat diprediksi, lingkungan tersebut adalah dinamis. Hal ini menyulitkan manajemen untuk meramalkan secara tepat kemungkinan yang terkait dengan berbagai alternatif keputusan. Pada sisi lain terdapat sebuah lingkungan yang stabil.

#### f. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Menurut van Metter dan van Horn (Winarno, 2002: 110) identifikasi indikator-indikator pencapaian merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator pencapaian ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan berguna didalam nguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. Meskipun demikian, dalam banyak kasus ditemukan beberapa kesulitan untuk mengidentifikasi dan mengukur pencapaian. Van Metter dan van Horn mengemukakan bahwa ada dua penyebab untuk menjawab hal ini, yaitu pertama, disebabkan oleh bidang program terlalu luas dan sifat tujuan yang kompleks. Kedua, akibat dari keaburan-keaburan dan kontradiksi-kontradiksi dalam pernyataan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan. Berdasarkan pendapat diatas, fenomena yang dipergunakan untuk mengetahui ukuran dan tujuan kebijakan ADD dalam penelitian ini adalah kesesuaian program dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan dan ketepatan sasaran sesuai dengan kebijaksanaan yang ditentukan.

#### METODE PENELITIAN

Metode merupakan prosedur atau cara dalam mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Usman dan Akbar (2004:4) penelitian deskriptif membuat penggambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu.

Metode kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan dengan berusaha menghayati dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif sendiri (Usman dan Akbar, 2004:81). Dalam penelitian ini juga

menggunakan survei guna memperoleh data primer mengenai kebijakan alokasi dana desa di Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow.

### **Fokus dan Dimensi Penelitian**

Ada dua hal yang ingin dicapai melalui penetapan fokus. *Pertama*, penetapan fokus untuk membatasi studi, misalnya pada penggunaan teori-teori tertentu yang sesuai dengan masalah yang diteliti, sedang teori-teori yang tidak sesuai sedapat mungkin dihindari penggunaannya. *Kedua*, penetapan fokus penelitian berfungsi untuk memenuhi kriteria seperti perolehan data yang baru dilapangan. Dengan bimbingan dan arahan suatu fokus penelitian, maka diketahui data mana yang perlu dikumpulkan dan yang tidak perlu dimasukkan ke dalam sejumlah data yang sedang dikumpulkan (Moleong 2001 : 63).

Permasalahan dan fokus penelitian sangat terkait. Permasalahan dijadikan acuan dalam fokus, walaupun fokus dapat berubah dan berkembang sesuai dengan perkembangan permasalahan penelitian yang ditemukan di lapangan. Fokus penelitian ini diarahkan pada faktor-faktor yang memengaruhi proses implementasi kebijakan ADD.

Lokasi penelitian adalah Desa Doloduo Satu Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow yang melaksanakan kebijakan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa. Penetapan Lokasi penelitian ini karena Desa Doloduo Satu adalah salah satu desa dari 16 desa di Kecamatan Dumoga Barat.

Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Data primer diperoleh langsung dari para informan berupa informasi di lapangan, yang meliputi implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa dengan faktor-faktor yang memengaruhi. Adapun nara sumber adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan Desa dan

masyarakat. Sebagai informan kunci adalah Camat Dumoga Barat. Data sekunder diperoleh melalui laporan-laporan/buku-buku/catatan-catatan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti.

### **Teknik Pengumpulan dan Analisis Data**

Dalam pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, penelitian terhadap dokumen-dokumen, observasi, dan wawancara dengan pemerintah Kecamatan Dumoga Barat, Pemerintah Desa di wilayah kecamatan Dumoga Barat, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, *target group*, dan non-*target group* yang relevan dengan masalah penelitian. Adapun jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder.

Adapun teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis komponensial yang merupakan teknik analisis data kualitatif melalui analisis terhadap unsur-unsur yang memiliki hubungan-hubungan kontras satu sama lain dalam domain-domain yang telah ditentukan untuk dianalisis secara lebih terperinci. Kegiatan analisis dapat dimulai dengan menggunakan beberapa tahap yaitu pegelaran hasil observasi dan wawancara, pemilihan hasil observasi dan wawancara, menemukan elemen-elemen yang kontras. Selanjutnya pengecekan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi dengan sumber, metode dan penyidik (Moelong, 1998:178).

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Desa Doloduo Satu, Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow secara Geografis terletak di 110° 48' 55, 12" BT dan terletak 7° 02' 27,52' LS. Secara topografi desa Doloduo Satu termasuk dalam kategori daerah dataran rendah dengan ketinggian ± 50 meter dari permukaan laut (mdpl). Luas Wilayah Desa Doloduo Satu adalah 126,723 Ha, dengan empat dusun dan 8 RT. Penduduk

Desa Doloduo Satu terus mengalami pertumbuhan sampai tahun 2016 sebanyak 859 jiwa, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 0,7 %/tahun.

Bantuan Langsung ADD adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pemanggunan, Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Tak Terduga, yang pemanfaatan dan administrasi Pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa. Bantuan ini dimaksudkan sebagai bantuan Stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong-royong masyarakat dalam melaksanakan pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan.

#### Hasil

Penelitian dilakukan dengan wawancara dengan Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, Sekretaris Desa sebagai koordinator PTPK Desa, Bendahara Desa, lembaga-lembaga desa (LPM, Lembaga Adat, TP-PKK, RT, RW).

#### Implementasi Pelaksanaan ADD dan DD

Secara umum pelaksanaan ADD dan DD telah berjalan dengan baik. Adapun pelaksanaan kebijakan ADD dan DD di Desa Doloduo Satu Kecamatan Dumoga Barat dapat diketahui melalui proses tahapan implementasi kebijakan ADD dan DD disesuaikan dengan Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa yang meliputi :

**a. Proses Implementasi Kebijakan`di Desa Doloduo Satu Tahun 2016**

**1). Penyusunan Rencana Kegiatan di Desa Doloduo Satu Tahun 2016**

Informan Camat Dumoga Barat:

**“Penyusunan rencana kegiatan ADD dan DD telah berjalan dengan baik terbukti dari tersusunnya RKPdes dan APBDes,hal ini dilaksanakan RKPDes dan APBDesa menjadi syarat pencairan ADD dan DD.”**

(wawancara 5 Juni 2017)

Informan Kasie PMD Kecamatan Dumoga Barat:

**“Memang benar semua desa telah menyusun Rencana Kegiatan Pembangunan ( RKP ) dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa ( APBDes ), bahkan telah menjadi syarat pencairan ADD dan DD untuk tahap pertama selain memenuhi syarat lainnya.”**

(wawancara 6 Juli 2017).

Informan Kepala desa Doloduo Satu:

**“Di desa kami RKPDes dan APBDes sudah tersusun dengan melibatkan masyarakat.”**

(wawancara 6 Juni 2017)

**2). Pelaksanaan Kegiatan ADD/DD di Desa Doloduo Satu**

Pelaksanaan kegiatan ADD dan DD, para

informan memberikan pernyataan yang sama yaitu bahwa semua kegiatan ADD dan DD telah dilaksanakan semuanya dengan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah sesuai APBDesa.

Informan Camat Dumoga Barat:

**“Menurut pengamatan kami semua kegiatan ADD dan DD di wilayah kecamatan Dumoga Barat telah berjalan dan dilaksananan dengan baik, yang dilaksanakan oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) baik itu di bidang pemerintahan, Bidang Pembangunan, Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, meskipun masih ada sebagian yang terlambat.”**(wawancara 5 Juni 2017).

Informan Kasi PMD Kecamatan Dumoga Barat:

**“Pelaksanaan ADD dan DD di wilayah Kecamatan Dumoga Barat telah seratus persen selesai.”**(wawancara 5 Juni 2017).

Informan Kepala Desa Toraut:

**“Sudah semua dan dapat dicek di lokasi kegiatan untuk membuktikan bahwa semua kegiatan ADD dan DD yang sudah tertera dalam APBDesa itu sudah kami laksanakan semuanya.”**

(wawancara 6 Juni 2017).

### **3). Pertanggungjawaban Kegiatan**

Pertanggungjawaban kegiatan ADD Dan DD terdapat kesamaan dari para informan. Informan Camat Dumoga:

**“Pertanggungjawaban kegiatan ADD dan DD dalam bentuk SPJ telah dibuat oleh tiap-tiap desa, baik untuk pencairan tahap I maupun tahap II. Melakukan sosialisasi kebijakan dan tatacara pengelolaan ADD dan DD. Melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ADD dan DD. Melaporkan secara rutin tentang pelaksanaan kegiatan ADD pada pemerintah kabupaten.”**

(wawancara 5 Juni 2017).

Informan Kasi PMD Kecamatan Dumoga Barat:

**“Pencairan ADD dan DD tahap I dan**

**tahap II maupun tahun depan selalu mensyarakatkan melampirkan SPJ sesuai Pedoman Pelaksanaan ADD dan DD, sehingga semua desa telah menyelesaikan SPJ pada tahun sebelumnya meskipun sering terlambat dan selalu mendapat pendampingan.”**(wawancara 10 Juni 2017).

Informan Kepala Desa Doloduo Satu:

**“Sudah pasti kami buat SPJ ADD dan DD karena menjadi persyaratan untuk pencairan tahap berikutnya.”**

(wawancara 11 Juni 2017).

#### **4). Pelaporan dan Evaluasi**

Camat dan Kasie PMD Kecamatan Dumoga Barat mengatakan pelaporan pelaksanaan ADD dan DD disusun dan disampaikan secara berkala setiap bulan secara berjenjang melalui tingkat Desa, Kecamatan dan Tingkat Kabupaten.

### **Faktor-faktor yang memengaruhi Implementasi Kebijakan ADD dan DD**

Faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan ADD dan DD dapat diuraikan pada hasil penelitian sebagai berikut :

#### **a. Komunikasi**

Komunikasi merupakan proses terjadinya interaksi penyampaian pesan melalui mediator. Pengaruh faktor komunikasi terhadap implementasi adalah pada

kejelasan dan isi pesan untuk dapat dipahami secara menyeluruh oleh penerima pesan atau program.

#### **1). Intensitas Sosialisasi Kebijakan ADD dan DD**

Berkaitan dengan ada tidaknya sosialisasi antara aktor kebijakan dengan pelaku kebijakan diperoleh keterangan yang berbeda dari informan. Misalnya dari informan Camat Dumoga Barat:

**“Sosialisasi ADD dan DD telah dilaksanakan oleh Tim Kabupaten Bolaang Mongondow dan diikuti oleh Camat, Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara**

**Desa.”**(wawancara 5 Juni 2017).

Informan Kepala Desa Ikhwan:

**“Pihak Kabupaten telah memberikan sosialisasi kepada kami tentang ADD dan DD tentang Pedoman pelaksanaan Keuangan Desa.”**

(wawancara 11 Juli 2017).

#### **2). Kejelasan Komunikasi**

Mengenai kejelasan pesan yang disampaikan oleh para komunikator atau penyampai pesan.

Informan Sekretaris Desa Doloduo Satu:

**“Penggunaan dana ADD, sebagai Sekretaris Desa tidak mengalami berbagai kesulitan. Namun pada tataran**

**administrasi  
pertanggungjawaban  
keuangan, terus  
terang kami masih  
mengalami  
kebingungan.”**

(wawancara 11 Juni  
2017).

**b. Sumber Daya**

Dalam hal sumber daya pendukung kebijakan ADD dan DD, para informan mempunyai tanggapan yang beragam, namun mereka sepakat perlu adanya peningkatan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun yang lainnya.

**1). Kemampuan Sumber Daya Manusia**

Informan Camat Dumoga Barat:

**“Memang pendidikan dari para pelaksana ADD sangat memengaruhi kualitas pelaksanaan ADD. Ketika kita ajak untuk tepat waktu, tepat mutu dan tepat administrasi, mereka lambat untuk mengikuti, maklum saja pendidikan mereka sebagian besar SLTP.”**(wawancara 05 Juni 2017).

**2). Fasilitas Pendukung Kebijakan ADD.**

Berkaitan dengan fasilitas-fasilitas yang mendukung kebijakan ADD, pada prinsipnya para informan menyadari permasalahan utama pelaksanaan ADD adalah kurang adanya dukungan dana dari pendapatan desa lainnya.

Misalnya disampaikan informan Camat Dumoga Barat:

**“Desa-desa di wilayah Dumoga Barat tidak dapat mengandalkan pendapatan dari kekayaan desa karena potensi desa yang minim.”**(wawancara 5 Juni 2017).

**c. Sikap Pelaksana**

Dalam hal sikap pelaksana, para informan mempunyai tanggapan yang senada, yaitu terdapat sikap pelaksana yang mendukung pelaksanaan ADD:

**1). Persepsi Pelaksana**

Informan Kepala Desa Doloduo Satu:

**“Penting sekali karena sangat dibutuhkan bagi desa kami.”**  
(wawancara 12 Juni 2017).

Informan Camat Dumoga Barat:

**“Saya yakin semua Kepala Desa di wilayah Dumoga Barat akan memiliki persepsi yang sama terhadap kebijakan ADD, yaitu mendukung sepenuhnya bahkan berharap dananya akan semakin ditingkatkan.”**  
(wawancara 5 Juni 2017).

**2). Respons Pelaksana**

Rerhadap respons pelaksana, para informan memberikan pernyataan yang berbeda. Misalnya dari informan Ketua BPD desa Doloduo Satu:

**“Pak Kades sangat respons terhadap ADD, buktinya mampu**

**memanfaatkan dana ADD yang kecil untuk membangun drainase yang tadi sudah saya ceritakan proses pembangunannya."**

(wawancara 6 Juni 2017).

3). Tindakan Pelaksana

Sekalipun ada pelaksana kebijakan ADD yang kurang respons, namun semua informan menyatakan bahwa pelaksana ADD telah membuat kegiatan dan langkah-langkah, seperti informan Kades Doloduo Satu:

**"Dana ADD kami manfaatkan yang tiga puluh persen untuk operasional Pemerintahan Desa sedangkan tujuh puluh persen untuk pemberdayaan masyarakat, antara lain untuk membangun drainase, gorong-gorong."**(wawancara 6 Juni 2017).

d. **Struktur Organisasi Pelaksana**

Dalam hal struktur organisasi pelaksana kebijakan organisasi, para informan mempunyai tanggapan yang senada, yaitu telah adanya struktur organisasi pelaksana kebijakan ADD.

1). Pembentukan Struktur Organisasi

Terhadap pembentukan struktur organisasi pelaksana ADD antara lain dinyatakan informan Camat Dumoga Barat:

**"Sesuai dengan petunjuk teknis sudah terdapat Tim Pelaksana ADD ditingkat**

**desa."**(wawancara 14 Juni 2017).

2). Pembagian Tugas

Terhadap pembagian tugas dalam organisasi pelaksana para informan memberikan pernyataan yang senada, antara dari informan Ketua LPMD:

**"Dalam juknis bupati seharusnya pelaksanaan ADD ditangani Lembaga Kemasyarakatan, namun kenyataannya LPMD tidak pernah dilibatkan."**

(wawancara 12 Juni 2017).

3). Koordinasi para Pelaksana Kebijakan

Hasil penelitian penulis terhadap koordinasi para pelaksana kebijakan disampaikan Sekretaris Desa Doloduo Satu:

**"Pak Kades memang menugaskan saya untuk menyelesaikan SPJ pelaksanaan ADD, tapi saya tidak bisa menyelesaikan karena dananya di pakai apa saja tidak pernah diberitahukan**

**saya."**(wawancara 12 Juni 2017).

e. **Lingkungan**

Terhadap fenomena lingkungan pelaksana kebijakan organisasi, para informan mempunyai tanggapan yang berbeda-beda:

1). Kapasitas Lingkungan

Kapasitas lingkungan adalah terkait dengan kemampuan BPD dan lembaga kemasyarakatan desa dalam

mempengaruhi kebijakan ADD.

Informan Camata Dumoga Barat:

**“Dalam Pelaksanaan ADD, BPD memiliki peran untuk mengawasi sedangkan lembaga kemasyarakatan desa seperti LPMD, PKK RT dan lembaga lainnya membantu Kades selaku Kuasa Anggaran dalam Pelaksanaan ADD. (wawancara 5 Juni 2017).**

- 2). Kompleksitas Lingkungan Terhadap kompleksitas lingkungan yaitu seberapa banyak campur tangan masyarakat dan lembaga-lembaga kemasyarakatan terhadap pelaksanaan kebijakan ADD, para informan memberikan pernyataan yang senada. Informan Ketua LPMD Desa Doloduo Satu: **“LPMD selalu dilibatkan dalam perencanaan.”** (wawancara 12 Juni 2017).

**f. Ukuran dan Tujuan Kebijakan**

Berdasarkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow No 10/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Keuangan Desa telah diatur penggunaan ADD, yaitu: paling banyak 30 % dari besaran APBDesa yang diteima maing-masing desa digunakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, paling sedikit digunakan untuk pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat.

**Pembahasan**

**Implementasi Kebijakan ADD**

Pelaksanaan ADD ini telah terpenuhi yaitu semua desa dapat melaksanakan kebijakan dengan cukup baik. Namun apabila dikaitkan dengan pernyataan Van Metter dan Van Horn (Winarno, 2002:2) yang membatasi implementasi publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya, maka tujuan ADD belum tercapai sepenuhnya.

Pertama, peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, pencapaian tujuan ini optimal karena desa-desa di Kecamatan Dumoga Barat adalah desa yang dikategorikan pendapatan desanya sangat rendah. Kenyataan ini membutuhkan bantuan dana guna peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Berdasarkan data di wilayah Kecamatan Dumoga Barat, pendapatan Asli Desa memberikan kontribusi pada pendapatan desa 53,22 % dari jumlah pendapatan desa. Sedangkan pendapatan Asli Desa memberikan kontribusi sebesar 24,41 %, maka ADD dan DD menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Kedua, peningkatan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Pencapaian tujuan ini belum berjalan secara optimal, lembaga kemasyarakatan hanya dilibatkan dalam penyusunan rencana kegiatan sedangkan dalam pelaksanaan dan pengendalian tidak dilibatkan.

Ketiga, peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat

pencapaian tujuan juga belum optimal. Berdasarkan data di lapangan mengenai proses kegiatan pembangunan yang dibiayai dari ADD dan DD 53,22 % dari jumlah pendapatan desa, hanya sebesar 29,45 % partisipasi dan swadaya masyarakat.

### **Hubungan Komunikasi dengan Implementasi Kebijakan**

Keberhasilan implementasi sebuah kebijakan antara lain ditentukan oleh faktor komunikasi. Menurut George Edward II ( 1980 ) dalam faktor komunikasi terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu transmisi, *clarity*, *consistency*. Dari hasil penelitian dalam hubungan komunikasi dengan pelaksana ADD, terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat.

Beberapa faktor pendorong adalah adanya sosialisasi yang dilakukan oleh tim kabupaten, pencapaian informasi dari pembuat kebijakan kepelaksana kebijakan berjalan lancar, terdapat konsistensi dalam pencapaian pesan/perintah kebijakan artinya terdapat perintah yang bertentangan. Sedangkan faktor penghambat adalah sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan ADD belum ada, sehingga pemahaman masyarakat mengenai ADD kurang, hal ini berakibat pada sulitnya mengajak partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ADD maupun dalam pengawasan kegiatan.

### **Hubungan Sumber Daya dengan Implementasi Kebijakan**

Peran penting sumber daya dalam implementasi suatu kebijakan disampaikan oleh Hessel (2003:55), 'komando implementasi mungkin ditransmisikan secara akurat, jelas dan konsisten, namun jika para implementor kekurangan sumberdaya yang perlu untuk menjalankan kebijakan, implementasi adalah mungkin menjadi tidak efektif.' Dari hasil penelitian dalam hubungannya dengan sumber daya dengan pelaksanaan

ADD, terdapat beberapa faktor pendorong adalah adanya kemampuan oleh para pelaksana untuk memberi dorongan kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam kegiatan ADD meskipun hanya berupa tenaga dan material, adanya kemampuan pelaksana kebijakan ADD dalam melakukan identifikasi dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan ADD, kelengkapan sarana/prasarana desa dalam mendukung kebijakan ADD, terdapat dukungan masyarakat terhadap kebijakan ADD berupa tenaga dan material.

Sedangkan faktor penghambat dalam sumber daya ini adalah rendahnya pendidikan para pelaksana ADD. Pemahaman pelaksana mengenai ADD kurang dan tidak adanya dukungan pendapatan desa yang memadai, sehingga menimbulkan kurangnya dukungan finansial dalam pelaksanaan kebijakan.

### **Hubungan Sikap Pelaksana dengan Implementasi Kebijakan**

Peran penting sikap pelaksana dalam implementasi suatu kebijakan disampaikan juga oleh Hessel (2003:90), 'jika para Implementor memperhatikan terhadap suatu kebijakan khusus, maka dimungkinkan bagi implementor untuk melakukan sebagaimana yang dimaksudkan para pembuat keputusan. Namun ketika sikap atau perspektif implementor ini berbeda dari para pembuat keputusan, proses mengimplementasikan sebuah kebijakan menjadi secara pasti lebih sulit.'

Pendapat Hessel diatas menunjukkan bahwa meskipun para pelaksana kebijakan memiliki kemampuan untuk melaksanakan sebuah kebijakan, namun ketika para implementor tidak setuju terhadap kebijakan tersebut, akan mengarah untuk tidak melakukan. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan ADD sikap pelaksana terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat.

Beberapa faktor pendorong adalah adanya persepsi pelaksana yang mendukung kebijakan ADD dan

adanya tindakan dan langkah-langkah nyata dari pelaksana. Sedangkan penghambat dalam sikap pelaksanaan adalah kurang responnya para pelaksana ADD yang menganggap kebijakan ADD adalah sebuah kebijakian rutin belaka.

### **Hubungan Struktur Birokrasi Dengan Implementasi Kebijakan**

Pengetian birokrasi menunjuk pada suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mengarahkan tenaga dengan teratur dan terus menerus, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan lain kata birokrasi adalah organisasi yang bersifat Hierarkhis, yang ditetapkan secara rasional untuk mengkoordinasikan pekerjaan orang-orang untuk kepentingan pelaksanaan tugas-tugas administratif (Leewis A.Coser dan Bernard Rosenberg, dalam Soekarno, 1982:293 ).

Dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan seharusnya struktur birokrasi yang ada turut mendukung dan berusaha semaksimal mungkin dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan didalam skebijakan yang ada , kaena kebijakan yang baik dan bagus dalam tataran konsep belu9m tentu berhasil dan bermanfaat sesuai tujuan apabila diimplementasikan tanpa dukungan sebuah aktor dan dapat mengakibatkan kegagalan bila tidak memperhatikan semua faktor yang berpengaruh terhadap implementasi sebuah kebijakan.

Dalam hubungan struktur organisasi dengan pelaksanaan ADD, terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorong adalah terbentuknya struktur organisasi berupa Tim Pelaksana ADD di semua desa, yaitu Kepala Desa selaku Kuasa Anggaran, Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD, Kepala Urusan selaku unsur teknis, dan Bendahara Desa dan dibantu Tim Pelaksana kegiatan khusus di bidang pembangunan dan peningkatan kapasitas. Sedangkan faktor penghambat dalam sumber daya ini adlah belum adanya

pembagian tugas diatara tim pelaksana ADD dan koordinasi tim pelaksana ADD.

### **Hubungan Lingkungan dengan Implementasi Kebijakan**

Lingkungan diartikan sebagai semua faktor yang berada di luar organisasi atau semua yang berada di luar batas organisasi. Lingkungan ini mencakup lingkungan umum yang memengaruhi organisasi secara tidak langsung, atau kurang begitu dirasakan secara langsung seperti kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum, dan lingkungan khusus yang memiliki pengaruh terasa secara langsung seperti pelanggan, pemasok, pesaing, pemerintah, serikat kerja, asosiasi perdagangan, dan kelompok penekan (Robbins dalam Keban, 2004:163). Dalam hubungan lingkungan dengan pelaksanaan ADD, terdapat faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorong adanya kapasitas BPD dan Lembaga kemsayarakat desa dalam ikut mendukung kebijakan ADD berupa kewenangan pengawasan atas pelaksanaan ADD oleh BPD serta peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam ikut membantu pelaksanaan ADD, sudah berperannya BPD dalam ikut mengawasi pelaksanaan ADD, adanya dukungan masyarakat berupa tenaga dalam gorong-rojong dan swadaya masyarakat.

Sedangkan faktor penghambat dalam lingkuang ini dalah belum berperannya lembaga kemasyarakatan desa dalam ikut membantu pelaksanaan ADD, bahkan lembaga kemasyarakatan masih kurang turut campur tangan dalam pelaksanaan ADD.

### **Hubungan Ukuran dan Tujuan Kebijakan dengan Implementasi Kebijakan**

Standar dan tujuan kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn (Winarno 2002:112) adalah kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah tentang program yang dimaksud. Sasaran yang ingin dicapai adalah jumlah perubahan yang terjadi dan sejauh mana konsensus

tujuan antara pemeran-pemeran dalam proses implementasi. Demikian juga Mazmanian dan Sabatier dalam Sunarsono (2001:102), menyetatkan standar dan tujuan kebijaksanaan yang dirumuskan dengan cermat dan disusun dengan jelas dengan urutan yang dirumuskan dengan cermat dan dengan jelas dengan urutan kepentingannya memainkan peran yang amat penting sebagai alat bantu dalam mengevaluasi program, sebagai pedoman yang kongrit bagi pejabat pelaksana dan sebagai sumber dukungan bagi tujuan itu sendiri.

Dari hasil penelitian dalam hubungan ukuran dan tujuan kebijakan dengan pelaksanaan ADD, terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat.

Faktor pendorong tersebut adalah adanya kesesuaian antara pelaksanaan ADD dengan Peraturan Bupati mengenai ADD meskipun tidak semua kebijakan ADD dijabarkan dalam bentuk program oleh desa-desa di wilayah Kecamatan Dumoga Barat, karena disesuaikan dengan kebutuhan dan skala prioritas masing-masing desa.

Sedangkan penghambat dalam ukuran dan tujuan kebijakan ini kurangnya ketepatan sasaran apabila dibandingkan dengan rencana ADD, bahkan ada yang tidak dapat menyelesaikan kegiatan yang sudah direncanakan. Meskipun demikian ada juga desa yang melaksanakan kegiatan melebihi dari rencana yang ada.

## SIMPULAN

Implementasi Kebijakan ADD dan DD di Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow berjalan cukup lancar, dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan dan pertanggungjawaban. Namun demikian pencapaian tujuan ADD dan DD belum optimal. Peningkatan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan, mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong-royong masyarakat. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan, Bidang Pembinaan Masyarakat, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Juga

meningkatnya kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan, mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong-royong masyarakat.

Peningkatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pencapaian tujuan berjalan secara optimal karena desa-desa di Kecamatan Dumoga Barat pendapatan asli desa sangat rendah yaitu hanya mencapai 25,42 % sehingga membutuhkan bantuan dana guna peningkatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Peningkatan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan kurang optimal karena baru dilibatkan pada perencanaan sedangkan dalam pelaksanaan dan pengendalian belum keseluruhan dilibatkan.

Peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat. Belum optimalnya pencapaian tujuan ini karena kondisi perekonomian masyarakat yang kurang mendukung. Namun demikian masyarakat berpartisipasi, swadaya dan gotong-royong dalam bentuk tenaga dan material.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budi Winarno. 1989. *Teori Kebijakan Publik*. Pusat Antar Universitas Studi Sosial. Universitas Gajah. Yogyakarta.
- Dye Thomas R. 1981. *Understanding Public Policy Making*. New York-Holt, Rinehart & Winston.
- Gibson, Ivanovich, Donnely. 1989. *Organisasi dan Manajemen*. Erlangga. Jakarta.
- Hessel, Nogi S. Tangkilisan. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik, Transformasi Pikiran George Edward*. Lukman Offset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia. Yogyakarta.

Islamy, M. Irfan. 1997. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi Aksara. Cetakan Ke- 8. Jakarta.

Moloeng, Lexy. J. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Mar'at. 1982. *Sikap Manusia : Perubahan dan Pengukuran*. Ghalia Indonesia. Bandung.

Robbins, Stephen P. 2006. *Perilaku Organisasi*. Edisi Kesepuluh. PT. Indeks. Jakarta.

Samudra Wibawa. 1994. *Kebijakan Publik, Proses dan Analisis*. Intermedia. Jakarta.

Subarsono, AG . 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Steers, Ricard M.. ( terjemahan ). *Efektivitas Organisasi*. Cetakan Kedua. Erlangga. Jakarta.

Umar, Husein. 2001. *Riset Sumber Daya Manusia dalam Organisasi*. Edisi Revisi. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.